

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia memiliki salah satu masalah yang sering terjadi yaitu masalah pengangguran. Pengangguran terdapat dalam setiap negara, terutama pada pengangguran normal, yang diakibatkan adanya masa transisi dari seseorang ketika meninggalkan pekerjaan lama dan belum menemukan pekerjaan yang baru, atau ketika baru lulus dari pendidikan dan sedang mencari pekerjaan.¹ Besarnya tingkat pengangguran dapat menunjukkan kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat diketahui adanya ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima masyarakat.²

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Sehingga setiap negara berusaha untuk mengurangi jumlah pengangguran pada tingkat yang wajar. Dalam teori ekonomi makro, masalah pengangguran di bahas pada pasar tenaga kerja (*labour market*) yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah dan tenaga kerja.³

Tingginya angka pengangguran di sebabkan banyaknya permintaan perusahaan atau lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka para pencari pekerja, banyaknya perusahaan yang mencari lulusan diploma ataupun sarjana. Karenanya pengangguran merupakan pertanggung jawaban kolektif, terlebih

¹ Socharjoto Soekapdjo and Mitha Rachma Oktavia, "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia," *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 94–102, <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>.

² ni komang Sopianti and a.a ketut Ayuningsasi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran Di Bali," *Time* 1, no. 3 (2011): 1–192.

³ Syahrur Romi dan etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dikota Jambi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 7, No. 1, 2018, 1–2.

lagi pemerintah untuk bisa mencari solusi supaya menekan angka pengangguran yang terdapat di Indonesia.⁴

Pengangguran merupakan suatu masalah yang sering dialami oleh setiap daerah. Pengangguran yang tinggi juga dapat menghambat pembangunan jangka panjang bagi daerah tersebut, dan hal yang paling memprihatinkan akan menjadi beban masalah keluarga karena berakibat kemiskinan sehingga mendorong tingkat kriminalitas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tersebut.⁵ Pengangguran terjadi karena adanya angkatan kerja yang tinggi, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan laju kesempatan kerja maka pengangguran akan semakin bertambah.

Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh penambahan tenaga kerja baru yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya, karena jika dibiarkan saja akan berdampak buruk baik kepada dirinya, keluarganya bahkan akan berdampak kepada negara. Orang yang manganggur akan menggantungkan dirinya kepada orang-orang berproduktif, sehingga akan menciptakan ketergantungan yang tinggi dan merosotnya pendapatan perkapita.⁶

Pengangguran Terbuka merupakan keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan dan latar belakang pendidikan.⁷ Berikut ini adalah tabel

⁴ Rizki Ardian, Muhamad Syahputra, and Deris Dermawan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia," *EBISMEN Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 3 (2022): 190–98.

⁵ Sri Yuni Bintang and Riandani Rezki Prana, "Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan," *Civitas: Jurnal Studi Manajemen* 2, no. 2 (2020): 97–100, <https://journals.synthesispublication.org/index.php/civitas/article/view/156>.

⁶ Devanto Shasta Pratomo² Mutiara Ayu Maulidina¹, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya* 8, no. 2 (2018): 210–21.

⁷ Vikky Lukmawan, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Pengangguran, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2014 -2018," *Doctoral Dissertation*, 2020.

perbandingan pengangguran terbuka antar indonesia, jawa tengah, dan kabupaten kudus.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka pada Periode 2009-2022

| Tahun | Presentase Jumlah Pengangguran |
|--------------|---------------------------------------|
| 2009 | 7,36 |
| 2010 | 7,00 |
| 2011 | 8,32 |
| 2012 | 5,89 |
| 2013 | 8.07 |
| 2014 | 5.03 |
| 2015 | 5.04 |
| 2016 | 5.01 |
| 2017 | 3.56 |
| 2018 | 3.28 |
| 2019 | 3.80 |
| 2020 | 5.53 |
| 2021 | 3.77 |
| 2022 | 3.21 |

Sumber: BPS Kudus 2024

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa secara umum jumlah pengangguran pada periode 2009-2022 di Kabupaten Kudus mengalami fluktuasi. Kenaikan terbesar pengangguran di Kabupaten Kudus terjadi pada periode 2011 sebesar 8,32 persen, sedangkan penurunan terbesar pada pengangguran di Kabupaten Kudus terjadi pada periode 2022 sebesar 3,21 persen, dikarenakan pada waktu 2022 telah mengalami stabilnya perekonomian di Kabupaten Kudus setelah covid-19.

Tingkatan inflasi pada suatu Kabupaten yang di impikan yaitu rendah, sehingga akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat besar. Sebaliknya, bila tingkatan inflasi yang di impikan besar, maka akan terjalin tingkat pengangguran yang relatif rendah.⁸ Inflasi adalah sebuah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Ketika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa dalam negeri akan mengalami kenaikan. Naiknya barang dan jasa tersebut menyebabkan turunya nilai mata uang. Maka dari itu,

⁸ Sopianti and Ayuningsasi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran Di Bali.”

inflasi dapat juga diartikan penurunan mata uang terhadap barang dan jasa secara umum.⁹

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir setiap negara di dunia adalah inflasi. Definsi dari inflasi yaitu kecendrungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga atau barang-barang lainnya.¹⁰

Inflasi yaitu salah satu indikator perekonomian yang penting dalam laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak tidak stabilnya dalam perekonomian.¹¹ Salah satu yang ditimblkan inflasi agar terjadinya ketidak stabilan dalam perekonomian yaitu mengurangi nilai kekayaan dalam bentuk uang dan memperburuk distribusi pendapatan.¹²

Inflasi mempunyai akibat positif serta negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi serta tidak stabil merupakan gambaran dari ketidak stabilan dalam perekonomian yang menyebabkan pada meningkatnya tingkatan harga barang dan jasa secara universal serta terus menerus, dan berdampak pada makin tingginya tingkatan pengangguran di Indonesia.¹³ Inflasi berarti perkembangan perekonomian dimana harga dan gaji meningkat, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran dan jumlah uang beredar sangat banyak.

⁹ Fandi Chandra Irawan, “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2000-2020,” *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 6, no. 1 (2022): 49–58, <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19798>.

¹⁰ Edyson Susanto, Eny Rochaida, and Yana Ulfah, “Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan,” *Inovasi* 13, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2435>.

¹¹ Desrini Ningsih and Puti Andiny, “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 2, no. 1 (2018): 53–61.

¹² Irawan, “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2000-2020,” 2022.

¹³ Ningsih and Andiny, “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.”

Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang secara terus menerus dalam rata-rata tingkat harga merupakan fenomena ekonomi yang berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi di dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik sehingga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu faktor penyebab terjadinya inflasi karena jumlah uang beredar meningkat, depresiasi nilai tukar rupiah, krisis ekonomi dan ekspektasi terhadap inflasi yang tinggi. Inflasi menyebabkan timbulnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan distribusi pendapatan dimana masyarakat kelas bawah berpendapatan tetap karena turunnya daya beli sedangkan masyarakat kelas atas memiliki aset-aset finansial yang dapat melindungi kekayaannya dari inflasi sehingga daya belinya relatif tetap. Kedua, inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Inflasi di Kabupaten Kudus dapat dicermati berdasarkan tabel BPS di bawah ini pada periode 2013-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Laju Inflasi di Kabupaten Kudus pada Periode 2009-2022

| Tahun | Inflasi (Persen) |
|--------------|-------------------------|
| 2009 | 3,00 |
| 2010 | 7,65 |
| 2011 | 3,34 |
| 2012 | 4,77 |
| 2013 | 8,31 |
| 2014 | 1,67 |
| 2015 | 3,28 |
| 2016 | 2,32 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | 3,11 |
| 2019 | 3,02 |
| 2020 | 1,24 |
| 2021 | 1,59 |
| 2022 | 6,40 |

Sumber: BPS Kudus 2024

¹⁴ Yenni Del Rosa, Imran Agus, and Mohammad Abdilla, "Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter Dan Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia," *Urnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 21, no. 2 (2019): 283–93.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwasanya laju inflasi dari tahun ketahun mengalami fluktasi. Pada periode 2013 merupakan inflasi tertinggi diantara periode-periode lainnya yaitu sebesar 8.31 persen. Namun, inflasi menurun drastis pada periode 2020 sebesar 1.24 persen. Penurunan tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan melemahnya permintaan barang dan jasa. Pada periode 2022 inflasi di Kabupaten Kudus telah mengalami kenaikan kembali pasca covid-19 sebesar 6.40 persen.

Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang sudah dikerjakan dan diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan dan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.¹⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tenaga kerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku pembangunan.¹⁶

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber panghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan kepuasan kerja.

Sedangkan bagi pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan

¹⁵ Devanto Shasta Pratomo and Putu Mahardika Adi Saputra, "108-Article Text-242-1-10-20120516," *Journal of Indonesian Applied Economics* 5 (2011): 269–84.

¹⁶ Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Ulum* 10 No 2 (2015).

produktivitas dan etos kerja. Sementara pemerintah melihat upah, di satu sisi untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedang di sisi lain untuk mendorong kemampuan dan daya saing usaha.¹⁷

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa Negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.¹⁸

Upah memiliki dua sisi yang penting yakni bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja menganggap upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya yang berdampak pada adanya upaya dari pekerja meningkatkan pendapatannya, sedangkan perusahaan menganggap upah sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan produksi, sehingga dalam berproduksi perlu melakukan efisiensi dengan cara mengurangi biaya tenaga kerja.

Adanya tuntutan pekerja dalam memperoleh upah yang semakin besar, akan berakibat semakin tingginya biaya produksi yang dapat meningkatkan harga produknya, sehingga akan berdampak pada penurunan permintaan konsumen dan akhirnya perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja, agar perusahaan tetap efisien dan dapat bertahan di pasar. Hal ini, berakibat semakin meningkatnya pengangguran.¹⁹ Perkembangan upah minimum kabupaten Kudus diamati pada tabel dari BPS pada periode 2013-2022 sebagai berikut:

¹⁷ Armansyah Walian, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis* 5 No 2 (2017).

¹⁸ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Eksos* 8 No 3 (2018).

¹⁹ Soekapdjo and Oktavia, "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia."

Tabel 1.3 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus pada periode 2009-2022

| Tahun | Upah Minimum (Rupiah) |
|-------|-----------------------|
| 2009 | 750.694,00 |
| 2010 | 775.000,00 |
| 2011 | 840.000,00 |
| 2012 | 889.000,00 |
| 2013 | 990.000,00 |
| 2014 | 1.150.000,00 |
| 2015 | 1.380.000,00 |
| 2016 | 1.608.200,00 |
| 2017 | 1740.900,00 |
| 2018 | 1.892.500,00 |
| 2019 | 2.044.467,75 |
| 2020 | 2.218.451,95 |
| 2021 | 2.290.995,00 |
| 2022 | 2.293.058,26 |

Sumber: BPS Kudus 2024

Table 1.3 menunjukkan bahwa mulai periode 2009 sampai 2022 tingkat upah minimum Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2015, dari 1.150.000,00 rupiah pada periode 2014 menjadi 1.380.000,00 rupiah pada periode 2015.

Faktor upah minimum juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.²⁰

Aktivitas pertumbuhannya perekonomian adalah sebuah faktor paling penting pada penilaian kinerja sebuah perusahaan ekonomi, khususnya bagi analisis hasil pembangunan ekonomi bagi sebuah negara ataupun wilayah. Perkonomi tumbuh ketika produksi barang maupun layanan naik dari masa ke masa.

²⁰ Foengsitanyoyo Trisantoso Julianto and Suparno, "Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2016): 229–56, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/914>.

Karenanya, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sejauh apa kegiatan ekonomi bisa melahirkan pendapatan tambahan ataupun kemakmuran sosial selama kurun waktu tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah yang senantiasa baik mengilustrasikan kegiatan ekonomi negara atau wilayah itu sendiri mengalami perkembangan yang baik.²¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka penjelasan di atas menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.²² Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kudus diamati pada tabel dari BPS pada periode 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kudus Pada Periode 2009-2022

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
|--------------|----------------------------|
| 2009 | 5.15 |
| 2010 | 5.36 |
| 2011 | 4.24 |
| 2012 | 4.11 |
| 2013 | 4.36 |
| 2014 | 4.43 |
| 2015 | 3.88 |
| 2016 | 2.54 |
| 2017 | 3.21 |
| 2018 | 3.24 |
| 2019 | 3.09 |

²¹ Ardian, Syahputra, and Dermawan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia."

²² Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di kota Jambi."

| | |
|------|-------|
| 2020 | -3.11 |
| 2021 | -1.98 |
| 2022 | 2.50 |

Sumber: BPS Kudus 2022

Table 1.4 Menurut data Badan Pusat Statistik Kudus, dapat diamati bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Kudus mengalami fluktuasi dari periode 2018 hingga periode 2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada periode 2014. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada periode 2020 sebesar -3.11 dan pada periode 2021 sebesar -1.98, penurunan tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Setelah 2 tahun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pada periode 2022 yaitu sebesar 2.50.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Winra Purba, Pinondang Nainggolan dan Pawan D Panjaitan dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara” menjelaskan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Artinya naiknya angka Inflasi dapat mempengaruhi jumlah angka pengangguran secara signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sri Yuni Bintang dan Riandani Rezki Prana dengan judul “Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan” menjelaskan bahwa variabel secara parsial inflasi tidak berpengaruh.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Devi Dwi Nuzulaili dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020” menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Pengangguran di Banten. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan U. Sulia Sukmawati dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kalimantan Barat Periode 2017-2021” menjelaskan bahwa upah minimum tidak memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Winra Purba, Pinondang Nainggolan dan Pawan D Panjaitan dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara” menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Artinya naiknya angka Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi jumlah angka pengangguran secara signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rizki Ardian, Muhamad Syahputra dan Deris Dermawan dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia” menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dengan negatif serta tidak signifikan pada variabel tingkat pengangguran terbuka. Koefisien yang bertanda negatif memiliki makna bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Dari permasalahan di atas dan dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesenjangan antara variabel satu dengan yang lain, bahwasannya di hasil yang diperoleh tidak semuanya signifikan melainkan terdapat hasil yang tidak signifikan, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian menggunakan variabel terkait tetapi dengan objek yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Karena banyaknya penyebab pengangguran terbuka, maka penulis kali ini berfokus pada tiga variabel yaitu inflasi, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di kabupaten kudus. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah: **DAMPAK INFLASI, UPAH MINIMUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2022.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Kudus tahun 2009-2022?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Kudus tahun 2009-2022?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Kudus tahun 2009-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus dalam periode 2009-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus dalam periode 2009-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus dalam periode 2009-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ekonomi untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap pengaruh pengangguran yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kudus

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga di harapkan memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam bidang ekonomi Syariah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan mempermudah dalam memahami setiap bagian yang ada dalam skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang penulis susun :

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi halaman, judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, motto, abstrak, pedoman transliterasi arab latin, persembahan, kata pengantar, daftara isi, daftar table, daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi proposal skripsi ini memuat lima bab, diantaranya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan penelitian dan sistematika.

BAB II : LANDASAN TEORI

Hal yang dikemukakan adalah landasan teori yang mendasari Dampak Inflasi, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka, kajian penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sample penelitian, variable penelitian, definisi operasional, Teknik pengumpulan data, uji instrument penelitian, analisis data dan uji statistik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Di bagian akhir proposal skripsi ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup pendidikan dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian pada proposal skripsi.